

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada perjalanan ketatanegaraan Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu di lindungi dan diperdayakan agar menjadi mandiri, kuat dan maju serta sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. UU Nomor 23 tahun 2014 di jelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada kabupaten atau kota didasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi daerah merupakan hak, kewajiban dan wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, desa diberikan sumber pendapatan asli desa yaitu usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, serta gotong royong. Kewenangan desa di atur di dalam UU No 6 tahun 2014 bab IV pasal 19 meliputi kewenangan berdasarkan asal usulnya, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.

Dalam sistem pemerintahan yang ada pada saat ini, desa memiliki kebijakan-kebijakan dalam membantu penyelenggaraan serta pembangunan yang terkait dengan anggaran dana desa. Semua itu

dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Karena hal tersebut, dalam pembangunan desa untuk mewujudkan otonomi yang diberikan kepada desa terdapat pembiayaan-pembiayaan, dimana pembiayaan tersebut memiliki hubungan dengan alokasi dana desa. Hal ini tercantum pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Selanjutnya, sistem pengelolaan yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya ada mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk kepada peraturan pemerintah No. 8 tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa prinsip pengelolaan dana desa meliputi transparansi, partisipasi serta akuntabilitas. Dalam peraturan pemerintah No.8 Tahun 2016 pasal 16 dinyatakan bahwa dana desa tahun 2016 akan

disalurkan secara bertahap oleh rekening kas umum negara (RKUN) kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui rekening kas umum daerah (RKUD) kemudian pemerintah daerah juga melakukan kepada desa melalui rekening kas desa (RKD).

Selanjutnya peraturan pemerintah tersebut mengatur tentang penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD baru dapat dilaksanakan apabila pemerintah kabupaten telah menyampaikan dokumen sebagai berikut : (1) perda tentang APBD, (2) peraturan bupati/walikota tentang cara pembagian dan penetapan rincian dana desa (3) laporan realisasi penyaluran dan konsolidai penggunaan dana desa. Sedangkan penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD juga baru dilakukan apabila pemerintah desa telah menyerahkan dokumen sebagai peraturan tentang APBD Desa dan laporan realisasi penggunaan dana desa.

Untuk memastikan pelaksanaan dana desa berjalan dengan lancar dan baik, maka kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri akan melakukan pemantauan dan asistensi kepada pemerintah daerah yang meliputi lima aspek, yaitu :

1. Penertiban peraturan bupati / walikota tentang tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa.
2. Penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD
3. Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi dana desa
4. Sisa dana desa

## 5. Penetapan prioritas penggunaan dana desa

Dalam peraturan pemerintah tersebut diatur hubungan dan kewenangan pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, hubungan pemerintah desa berada dibawah kecamatan dalam lingkup pemerintah kabupaten. Namun desa memiliki posisi dibawah kecamatan hanya terkait dengan struktur geografis, bukan berarti struktur koordinasi pemerintahan. Kecamatan kewenangan melakukan koordinasi penyusunan laporan kepala desa di wilayahnya. Artinya pola pemerintahan tetap dari kabupaten ke desa tidak melalui kecamatan. Dengan model demikian pemerintah desa bertanggung jawab secara vertikal kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati. Kewenangan pemerintah kabupaten terhadap pemerintah desa sesuai dengan UU No.6 Tahun 2014 pemerintah kabupaten juga berwenang menunda penyaluran dana desa apabila desa belum melengikai syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka setiap Desa di Kabupaten Lumajang mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN yang di transfer ke Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya dibagikan kepada setiap desa yang ada di Kabupaten Lumajang, dimana pengelolaan penggunaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Pemberian dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan kondisi

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kesatuan sistem penyelenggaraan negara.

Selama ini di Desa Kunir Kidul, pembangunannya bergantung dari pendapatan dana desa yang berasal dari APBN. Oleh karena itu untuk menunjang pembangunan di wilayah pedesaan khususnya di Desa Kunir Kidul, pemerintah pusat harus mengarahkan kepada beberapa kabupaten untuk melakukan pengalokasian dana langsung ke desa dari APBD nya. Kebijakan pengalokasian dana langsung ke desa ini disebut sebagai kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk Desa Kunir Kidul, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Lumajang. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa ini dapat mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan pembangunan di tingkat desa.

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, desa kunir kidul memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu dari beberapa kabupaten yang merencanakan dan melaksanakan kebijakan ADD. Pelaksanaan ADD di Kabupaten Lumajang ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, desa kunir kidul kabupaten lumajang semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap dengan adanya alokasi dana ke desa kunir kidul, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Kunir Kidul ini didasarkan pada alasan pertama, Tim Teknis ADD tingkat desa sebagai penanggungjawab operasional kegiatan ADD benar-benar terbentuk, terbukti dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Nomor 412.5/09/2016 tentang

Pembentukan Tim Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) . Tim Teknis ADD juga telah berfungsi sebagaimana mestinya membangun kerjasama dengan masyarakat untuk merealisasikan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan ADD, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan ADD tersebut.

#### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang pada ?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat keberhasilan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kunir Kidul, Kecamatan Kunir, Kabupaten Lumajang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Kunir Kidul.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah wawasan bagi Ilmu Pengetahuan Sosial pada umumnya dan Ilmu Pemerintahan pada khususnya.

2. Dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Desa Kunir Kidul mengenai pelaksanaan ADD dalam program pemberdayaan masyarakat yang telah berlangsung di Desa Kunir, untuk penyempurnaan pelaksanaan ADD pada tahun berikutnya.
3. Manfaat pribadi bagi peneliti adalah untuk memenuhi persyaratan akademis meraih gelar kesarjanaan pada program skripsi, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Malang. Dan sekaligus sebagai pembelajaran untuk melakukan penelitian lebih dalam.

#### **E. Definisi Konseptual**

Konsep adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu ide dan gagasan tertentu. Dalam suatu penelitian yang tentunya memiliki konsep dasar guna memberikan batasan-batasan yang berkaitan dengan konsep dasar dalam suatu penelitian. Adapun konsep yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Implementasi Kebijakan publik**

Implementasi kebijakan public adalah suatu aktivitas yang paling penting, akan tetapi tidak seperti anggapan orang bahwa setiap kebijakan itu akan terimplementasikan dengan sendirinya, seolah-olah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut suatu tinggal jalan. Realita



menunjukkan implementasi/pelaksanaan kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses emosional dan rasional yang teramat kompleks. Jadi dengan hal tersebut bisa saya simpulkan bahwasannya bukan sekedar berhubungan atau bersangkutan paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam prosedur-prosedur yang rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Studi implementasi, dipaksakan akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari seluruh proses kebijakan.

Implementasi kebijakan public sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan gunn (1986) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) dalam dua kategori yaitu :

a. Non – implementation (tidak terimplementasikan)

Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau kerjasama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau mungkin permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaan, sehingga hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

b. Unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil)

Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi ketika kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun melihat dengan kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan, semisal tiba-tiba terjadi peristiwa terjadi penggantian kekuasaan, bencana alam, dan lain sebagainya, kebijakan tersebut tidak berhasil dalam menunjukkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor : pelaksanaannya jelek, kebijakannya sendiri memang tidak baik dan memang kebijakan itu bernasib tidak baik.

Dengan demikian, suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan sebagai pelaksanaan yang jelek, baik pembuatan kebijakan maupun mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, adapun kebijakan yang tidak terimplementasikan karena telah gagal dan faktor penyebabnya adalah dari pembuat kebijakan tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik ialah kebijakan tersebut gagal karena sebenarnya sejak awal kebijakan tersebut memang jelek. Artinya, kebijakan tersebut telah dirumuskan dengan sembrono dan tidak didukung oleh informasi dan data yang memadai, alasan yang salah atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang sama sekali tidak realistis.

## **2. Alokasi Dana Desa**

Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi kepentingan desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota khususnya di Lumajang. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah khususnya pemerinta desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan pasal 72 ayat 1 huruf b UU No. 6 tahun 2014 tentang alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara.

#### **F. Definisi Operasional**

Untuk memperoleh data atau pemahaman indikator-indikator yang menuju pada konsep yang ingin didapat maka, aktifitas penelitian ini memiliki definisi atau langkah-langkah untuk memperoleh hasil data dan metode operasional sebagai alatnya. Adapun alat operasional yang dimaksud adalah :

1. Pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa di Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.
  - a. Penetapan prioritas penggunaan ADD di Desa Kunir Kidul.
  - b. Perencanaan penggunaan ADD di Desa Kunir Kidul.
  - c. Pelaksanaan Dana Desa di Desa Kunir Kidul.
  - d. Evaluasi dan Pelaporan ADD.

2. Faktor penghambat ADD di Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.
  - a. Faktor Intern.
  - b. Faktor Ekstern.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan suatu gambaran yang terperinci tentang situasi khusus, setting sosial, atau hubungan. Mayer dan Greenwood membedakan dua jenis deskripsi, yakni deskripsi kualitatif dan deskripsi kuantitatif. (zuriah nurul, 2006 : 227) Deskripsi kualitatif sifat-sifat yang membedakan atau karakteristik sekelompok manusia, benda dan peristiwa.

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan alasan peneliti berupaya menggali informasi dan data dari responden yang telah menjadi sumber dari penelitian ini. Selain itu, metode ini dirasakan sangat cocok untuk diterapkan dalam penelitian lapangan dengan alasan peneliti bisa berinteraksi langsung dengan responden serta mengamati langsung pergerakan obyek yang akan diteliti yakni tentang Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kunir kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang.

### **2. Lokasi penelitian**

Terkait lokasi penelitian, penulis mengambil tempat penelitian yang sesuai dengan judul Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa

(ADD) di Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang Jl.  
Desa Koprak Sohini.

### **3. Subjek penelitian**

Subjek penelitian adalah orang-orang yang diminta informasi terkait dengan pembahasan penelitian. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan pendekatan purposive sampling yang didasarkan pada tujuan atau keperluan yang telah ditentukan dengan kriteria tertentu. Purposive Sampling ini merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diharapkan sehingga mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial dalam berpendidikan yang sedang diteliti. (Sugiono, 2012 : 96) Subjek penelitian ini adalah Kantor Desa Kunir Kidul Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang yang memiliki informasi yang dipilih berdasarkan fungsi dan kedudukannya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Desa Kunir Kidul (Hasyim Nawawi)
- b. Tiga orang Staf atau karyawan kantor desa kunir kidul (Hadi Susanto, Derajat Ali, Palewen)
- c. Empat orang masyarakat desa kunir kidul (Malik, Ali, H. Dhori, Mistar)

### **4. Sumber data**

Sumber data merupakan orang-orang yang menjadi sasaran penelitian ini yang dianggap mengetahui fenomena yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini sumber data ialah perangkat Desa Kunir Kidul

Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Namun yang menjadi sumber utama ialah kepala desa kunir kidul yang dimana berhubungan langsung dengan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD). Sumber data sendiri dibagi menjadi dua, yaitu :

Data primer, merupakan data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber-sumbernya. Sumber data primer sendiri merupakan sumber data yang menggunakan berupa kata-kata yang diperoleh dari sumber informasi ataupun orang yang meneliti interview. Dengan adanya sumber data primer ini, peneliti berharap bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap karena langsung berhadapan dengan sumber yang dianggap mewakili dan faham serta mengetahui mengenai yang diteliti.

Data sekunder, merupakan salah satu sumber yang digunakan untuk mendukung data primer. Data sekunder adalah data atau keterangan yang juga diperoleh secara tidak langsung, baik dari buku, laporan serta majalah yang bersifat dokumen. Dalam hal ini data sekunder tersebut adalah dokumen-dokumen resmi, koran, maupun internet, perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan peneliti ini serta masyarakat umum (masyarakat Desa Kunir Kidul) yang juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini.

## **5. Teknik pengumpulan data**

### **a. Observasi**

Secara pandangan yang luas observasi itu merupakan pengamatan yang berarti setiap kegiatan dilakukan pengukuran. Akan tetapi,

observasi atau pengamatan disini diartikan sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. (sukardi, 2011 : 45)

Dalam melakukan metode observasi, cara yang paling tepat adalah melengkapi dengan format atau blanko pengamatan sebagai instrumennya. Format yang disusun oleh item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

#### **b. Interview (wawancara)**

Salah satu teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara untuk mencari keterangan dan pendapat melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan langsung oleh peneliti kepada narasumber. Dalam hal ini teknik wawancara dapat membantu mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan jelas serta langsung dari narasumber yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa (ADD) di desa kunir kidul.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat feedback artinya setiap jawaban dapat memberikan umpan balik bagi peneliti sehingga setiap jawaban yang belum dipahami dapat ditanyakan kembali secara jelas.

#### **c. Dokumentasi**

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti berupa berbagai macam tidak hanya dokumen resmi atau non resmi. Adapun dokumentasi ini merupakan metode pengumpulan data

dengan melihat catatan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi di dalam penelitian ini. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

## **6. Teknik analisa data**

Salah satu teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yang merupakan upaya untuk mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi bagian-bagian atau satuan yang dapat dikelola dalam suatu penjelasan tertentu dan menemukan apa yang penting dan apa yang bisa dipelajari untuk dapat di jelaskan kepada orang lain.(margono, 2009 : 37) Adapun tahapan-tahapan dalam teknik analisi data :

- a. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.
- b. Display data merupakan pengembangan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan di dalam melakukan penelitian.
- c. Pengambilan kesimpulan merupakan usaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala atau hambatan yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan



dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena,  
dan proposisi.

